

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Ekonomi internasional sekarang ini dapat dikatakan telah di dominasi oleh aliran pemikiran neo-liberal. Neo-liberal ini adalah satu aliran pemikiran ekonomi yang menekankan tiga hal, yaitu privatisasi, liberalisasi dan deregulasi. indikator yang bisa diangkat untuk menjustifikasi dominasi neoliberal ini adalah, kuatnya pengaruh lembaga-lembaga Bretton Woods seperti IMF, World Bank dan WTO, sebagai representasi penerapan agenda neoliberal diatas, beranggotakan hampir semua negara-negara di dunia. Lembaga-lembaga ini memiliki kekuatan untuk menekan melalui sejumlah aturan-aturan yang dihasilkan. Sementara pada ketiga lembaga tersebut kekuatan politik barat sangat kuat, dilihat dari mekanisme-mekanisme yang ada seperti memberikan hak veto kepada mereka sebagai penyumbang terbesar pada lembaga-lembaga tersebut.

Sejarah menunjukkan bahwa pasar bebas yang didorong oleh negara-negara maju, terutama Amerika Serikat sebagai super power, tidak memberikan dampak positif bagi sebagian besar masyarakat dunia. Konsentrasi kekayaan pada era dominasi pasar bebas hanya ada pada segelintir orang dan sebagian besar lainnya tidak memiliki kesejahteraan yang memadai. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin menjadi semakin lebar, bahkan dalam sepanjang sejarah dunia. Neo-liberal dianggap sebagai sistem yang melanggengkan situasi dimana ada pemenang dan yang kalah meski dalam kehidupan bernegara. Hal ini karena minimnya peran negara dalam mengatur roda perekonomian. Karena yang menjadi regulator utama adalah *market mechanism*.

Negara-negara Amerika Latin adalah negara berkembang yang sekarang ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki garis pemikiran yang kontra terhadap pasar bebas dan anti terhadap dominasi Amerika Serikat. Hugo Chavez terpilih sebagai presiden Venezuela melalui pemilu yang demokratis. Hugo Chavez adalah seorang yang anti terhadap pemikiran pro pasar bebas serta dominasi Amerika Serikat. Venezuela adalah salah satu negara pengekspor minyak terbesar dunia. Minyak yang diekspor oleh Venezuela disesuaikan dengan harga di pasar dunia. Pada tahun 2007, presiden Venezuela, Hugo Chavez menyalakan dalam pertemuan negara-negara Amerika Latin bahwa Venezuela akan menjual minyaknya ke negara-negara Amerika Latin dengan harga 50% dibawah harga pasar internasional. Ini adalah satu kebijakan luar negeri yang bercirikan anti neoliberal karena intervensi negara terhadap ekonomi sangat dalam yaitu dengan menentukan harga jual secara langsung.<sup>1</sup>

Sebagai sebuah negara hegemoni, bagi Amerika Serikat (AS), kawasan Amerika Latin memiliki nilai-nilai strategis. Hal ini didasarkan pada:<sup>2</sup>

1. Letak geografis wilayah Amerika Latin
2. Pengaruh Amerika Latin bagi posisi Amerika Serikat di dunia internasional
3. Hasil-hasil sumberdaya alam strategis yang dimiliki oleh negara-negara Amerika Latin
4. Ikatan Tradisional dan keterikatan terhadap wilayah ini
5. Tingginya tingkat investasi dan perdagangan terhadap wilayah ini
6. Pengaruh Brazil dan Mexico di Amerika Latin
7. Nilai-nilai kemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Yang dimaksud disini adalah bahwa harga tidak diserahkan semata mata pada mekanisme pasar internasional tetapi dengan intervensi negara (politik)

<sup>2</sup> Harold Molineu, *US Policy Toward Latin America From Regionalism to Globalism*, Westview Press, San Fransisco, 1990, hal. 9-10 dalam Emil

Dari poin-poin tersebut diatas dapat dilihat kepentingan AS terdiri atas:<sup>3</sup>  
*pertama*: kepentingan keamanan, *kedua*: kepentingan Politik, *ketiga*: kepentingan ekonomi.

Hubungan antara AS dan Amerika Latin telah terjalin sejak lama, hal ini terlihat pada dukungan AS terhadap perjuangan kemerdekaan Amerika Latin yang dilakukan oleh Simon Bolivar. Pada masa itu kekuatan Eropa terutama Spanyol merupakan ancaman terhadap AS. Kepentingan keamanan AS terhadap kawasan Amerika Latin tidak hanya terlihat pada masa sejarah namun juga pada masa Perang Dingin. AS melakukan *Containment Policy* (kebijakan pembendungan) sebagai upaya untuk menghalangi berkembangnya komunisme di dunia. Kebijakan ini dilakukan karena adanya krisis Kuba yang merupakan sekutu dekat Uni Soviet. AS khawatir dengan status nuklir yang dikirm Uni Soviet ke Kuba sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan AS. Selain itu keberhasilan Fidel Castro untuk berkuasa melalui gerakan militer di Kuba bagi pemerintahan yang pro AS merupakan ancaman baik ideologis maupun militer terhadap wilayah AS, hal ini dikarenakan kekhawatiran terhadap berpengaruhnya ide-ide (*spill over*) yang dibawa oleh Castro terhadap negara-negara di kawasan Amerika Latin. Oleh sebab itu AS memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara Amerika Latin lainnya melalui *Monroe Doctrine*.

Dari segi politik, AS memainkan perannya dalam menjaga stabilitas negara-negara Amerika Latin. Berkaitan dengan Perang Dingin, peranan AS terhadap wilayah ini adalah membentuk negara-negara Amerika Latin menjadi negara demokratis dengan menumbangkan penguasa-penguasa diktator yang kebanyakan berasal dari militer dan memiliki kedekatan dengan penguasa negara-negara komunis. Kepentingan AS yaitu membendung pengaruh komunisme tersebut. Oleh karenanya nilai-nilai demokrasi perlu untuk diperluas dan ditanamkan kepada negara-negara Amerika Latin. Keterlibatan AS tidak

---

<sup>3</sup> Ibid. hal 10

begitu nampak namun bisa dilihat dari bantuan yang diberikan kepada kudeta yang terjadi di Chili pada tahun 1973, penjaluan Presiden Jacobo Arbenz di Guatemala.<sup>4</sup>

Dari segi kepentingan Ekonomi, AS selain menawarkan ide-ide pembentukan sebuah blok perdagangan Amerika dengan mengajukan sebuah Piagam Ekonomi Amerika (*Economic Charter of The Americas*) juga melakukan *Dollar Diplomacy* (Diplomasi Dollar), diharapkan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah bentuk perdagangan antar negara Amerika Latin dengan AS sebagai patron dan sekaligus sebagai bentuk untuk melindungi dan mempromosikan unit-unit bisnis AS di Amerika Latin. Oleh karenanya AS selain mengajukan *Economic Charter of The Americas* juga mengajukan pembentukan sebuah kawasan perdagangan dibawah NAFTA (*North America Free Trade Agreement*) dan FTAA (*Free Trade Area of the Americas*). Semua itu dilakukan AS untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara Amerika Latin seperti minyak, gas alam, tembaga, timah dan perak.

Hugo Chavez yang terpilih sebagai presiden Venezuela menawarkan satu konsep kerjasama antara negara-negara Amerika Latin yang disebut sebagai *Bolivarian Alternative for The Americas* (ALBA). Ide ALBA ini pertama kali diajukan oleh Presiden Hugo Chavez di Isla Margarita pada *III Summit of the Heads of State and the Government of the Association of Caribbean States* pada bulan Desember tahun 2001.<sup>5</sup> ALBA adalah satu konsep kerjasama negara-negara Amerika Latin yang berbeda dengan bentuk kerjasama yang selama ini ada yaitu FTAA atau *Free Trade Area of the Americas*. FTAA menekankan pada pentingnya *transnational capital*, mendorong terwujudnya liberalisasi total pada

---

<sup>4</sup> Myles Frechette, *Rethinking Latin America: A New Approach in US Foreign Policy*, Harvard International Review, Summer 2006;28,2:ABI/INFORM Global, hlm. 28, dalam Email

Michael Fox, *Defining ALBA*, 4 Agustus 2006, <http://www.venezuelanalysis.com/analysis/1970>, 16 Mei 2008 pukul 11.50

perdagangan barang, jasa dan juga investasi. Sementara itu ALBA menekankan pada penghapusan kemiskinan dan eksklusifitas sosial. Lebih jauh, ALBA dijadikan sebagai representasi dari kepentingan seluruh masyarakat Amerika Latin.<sup>6</sup>

FTAA adalah institusi yang mengusung agenda neoliberal karena aturan-aturan yang ada menekan negara-negara Amerika Lain untuk melakukan privatisasi, liberalisasi dan deregulasi. FTAA menyebut privatisasi ini dengan terminologi an "*opening*" to international capital, di Venezuela pada tahun 1998 perusahaan multinasional membeli perusahaan nasional telephone, perusahaan listrik nasional dan termasuk perusahaan minyak Venezuela yaitu PDVSA. Perusahaan minyak Venezuela ini memproduksi minyak 3.3 barrel/hari, dan mendapatkan keuntungan \$66 triliun pertahunnya. Perusahaan ini juga memiliki stasiun minyak Amerika Serikat dan beberapa refinery di AS dan Eropa yang menjadikan perusahaan sebagai perusahaan kedua terbesar di Amerika Latin.<sup>7</sup>

Sementara itu opini yang berkembang dimasyarakat menyatakan beberapa hal negatif yang dihasilkan oleh FTAA, antara lain disebutkan:<sup>8</sup>

1. **FTAA hanya menyebabkan bencana;** secara substansial FTAA adalah ekspansi dari NAFTA. Pada masa NAFTA para pekerja dan keluarganya menderita; di Amerika Serikat lebih dari 879,280 lapangan pekerjaan hilang. Ketika para pekerja ini mendapatkan pekerjaan, mereka mendapatkan gaji 23% lebih kecil dari jumlah gaji yang mereka dapatkan sebelumnya. Di Meksiko, gaji pekerja pada sektor manufaktur lebih rendah dari pada masa sebelum NAFTA dan angka masyarakat yang hidup dibawah garis

Venezuelan Bank of External Commerce (Bancoex), "What is the Bolivarian Alternative for the Americas" <http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=1100>, 25 Mei 2007

Chris Carlson, "Washington's New Imperial Strategy in Venezuela" 13 May 2007, <http://www.venezuelanalysis.com/articles.php?artno=2035>, di download pada tanggal 25 Mei 2007  
Global Exchange, *Top Ten Reasons to Oppose the FTAA*, Article, pada situs <http://www.globalexchange.org/campaigns/ftaa/top10en.html>, 25 mei 2007 pukul 18.50 WIB

kemiskinan meningkat. Karena pembuangan limbah kimia yang sembarangan, daerah Maquiladora yang terletak antara AS dan Meksiko menyebabkan angka naiknya angka pengidap hepatitis.

2. **Perjanjian ditulis tanpa masukan dari warga/masyarakat;** perjanjian dalam FTAA hanya didominasi oleh korporasi-korporasi besar dari negara maju seperti Monsanto, Pfizer Pharmaceuticals, Citigroup, WorldCom, Raytheon, dan Shell.
3. **Perjanjian akan menyampingkan hak-hak buruh dan menyebabkan pengangguran yang lebih jauh;** berdasarkan kajian oleh Cornell University<sup>9</sup>, pada era NAFTA 2/3 dari perusahaan manufaktur dan telekomunikasi yang berhadapan dengan organisasi buruh, akan mengancam untuk memindahkan perusahaan mereka ke negara lain.
4. **Perjanjian ini akan merusak lingkungan;** pertumbuhan yang didorong oleh ekspor seperti yang ingin diwujudkan dengan perdagangan bebas telah merusak ekosistem dunia. Dibawah saran ini, banyak negara-negara "selatan" menebang hulannya, mengeksploitasi sumber daya alamnya untuk membayar utang luar negerinya.
5. **Perjanjian ini akan menyengsarakan keluarga pekerja;** kebijakan pertanian yang berorientasi export oleh NAFTA telah merendahkan pendapatan petani. Antara tahun 1995 dan 2000, petani mengalami penurunan harga jagung sampai 30%, 42% pada gandum, 34% pada kacang kedelai<sup>10</sup>. Oleh karena itu sejak pemberlakuan NAFTA sebanyak 3.800 petani kecil di AS meninggalkan pertanian.
6. **Perjanjian ini mengarahkan pada privatisasi pelayanan publik yang vital;** FTAA yang ada sekarang ini mendorong negara-negara untuk melakukan privatisasi pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, energi dan air. Banyak pihak menilai privatisasi ini akan merugikan bagi masyarakat termasuk kelas pekerja.

---

ibid  
ibid

7. Perjanjian ini mengarahkan demokrasi dimana yang penting adalah hak-hak korporasi; perjanjian perdagangan bebas hanya akan berbicara mengenai investasi dan ini hanya lebih banyak berkaitan dengan korporasi besar.
8. Perjanjian ini akan menyebarkan penggunaan organisme rekayasa genetik; penggunaan pupuk kimia yang didesakkan oleh FTAA mengancam lingkungan dan juga petani karena petani harus membayar untuk menggunakan pupuk tersebut karena hak paten yang dimiliki oleh perusahaan pupuk dari negara maju.
9. Perjanjian ini akan meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan; perdagangan bebas tidak menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat dunia. Selama masa lingginya pertumbuhan dunia karena perdagangan dan investasi, pada tahun 1960 – 1998, ketimpangan justru semakin lebar baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat nasional. Tanpa adanya penghapusan utang, negara-negara berkembang akan tetap berada dalam dominasi negara-negara maju, ketimpangan menjadi lebih parah dan pembangunan berkelanjutan tidak akan bisa terwujud.

## 1.2. Rumusan Masalah

Setelah terpilih sebagai presiden Venezuela, Hugo Chavez mempromosikan ALBA kepada negara-negara Amerika Latin sebagai satu konsep integrasi regional Amerika Selatan. Untuk itu sangat penting untuk melakukan kajian mengenai bagaimana peranan Hugo Chavez dalam gerakan anti-neoliberal di Amerika Latin terutama pada konteks mendorong ALBA dan apa landasan pemikiran di balik gagasan *Bolivarian Alternative for The Americas?*

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa landasan pemikiran dibelakang gagasan ALBA sebagai satu konsep kerjasama regional di Amerika Latin, sejauh mana konsep/gagasan tersebut di implementasikan dan mencoba untuk memberikan satu analisis mengenai keberlangsungan (*sustainability*) dari upaya penerapan ALBA.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Negara-negara Amerika Latin saat ini telah menjadi satu kekuatan yang besar yang secara ideologis menyatakan diri sebagai kontra terhadap pasar bebas oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk lebih memahami bagaimana Venezuela, sebagai salah satu negara di Amerika Latin, berupaya untuk membendung akselerasi arus pasar bebas yang dipromosikan oleh Globalisasi neoliberal. Dengan memahami langkah-langkah Venezuela ini, gambaran akan strategi negara-negara Amerika Latin lainnya kurang lebih dapat dipahami secara umum meski belum secara lebih mendalam.

Bagi para penyelenggara negara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan satu masukan penting bagi perumusan kebijakan ekonomi terutama yang berkaitan dengan kerjasama regional maupun internasional yaitu dengan badan-badan ekonomi dunia. Diharapkan juga dari tesis ini terbentuk pola untuk menerapkan transplantasi kebijakan (*modelling*) bagaimana Venezuela melalui Hugo Chavez memformulasi dan menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi-politik yang berpihak pada rakyat miskin serta bagaimana negara-negara di kawasan tersebut melalui organisasi sosial dan para pemimpin politik dapat membangun solidaritas dan kebersamaan.

### 1.5. Pendekatan Teori

Penekanan tesis ini adalah pada peranan Hugo Chavez sebagai pengambil kebijakan di Venezuela dan mendorong penerapan ALBA sebagai satu konsep regionalisme baru di Amerika Latin. Oleh karena itu pendekatan teori yang digunakan seharusnya menggunakan teori yang sedikit banyak menjelaskan tentang bagaimana ideologi mempengaruhi pengambilan kebijakan. Dalam penulisan tesis ini menggunakan teori Strukturasi oleh Anthony Giddens sebagai satu pendekatan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh ideologi terhadap pengambilan kebijakan.

Secara mendasar, teori Strukturasi terdiri atas 2 tema sentral yang menjadi poros yaitu; hubungan antara struktur dan pelaku serta sentralitas ruang dan waktu.<sup>11</sup> Penekanan atau fokus dalam ilmu sosial adalah praktik sosial (*social practices*). Praktik sosial ini berupa tindakan individu dalam masyarakat dalam banyak bentuknya, misalnya; mendaftar sekolah atau perguruan tinggi, melaksanakan ibadah di rumah, mengendarai mobil, menabung di bank atau menjadi pengambil kebijakan ekonomi-politik. Dalam teori strukturasi pelaku (*agen*) dan struktur (*structure*) tidak terpisah yang masing-masing adalah otonom tetapi berhubungan satu sama lain. Hubungan diantara keduanya pun bukan merupakan dualisme tetapi merupakan hubungan dualitas yaitu saling mempengaruhi atau terdapat hubungan yang sifatnya timbal-balik.

Dalam teori strukturasi, anggota masyarakat atau pelaku juga memiliki peran dan kepentingan-kepentingan tertentu dan dapat sekaligus mempengaruhi struktur yang ada. Disini individu memiliki sistem nilai yang ada padanya dan menjadi motor penggerak bagi tindakan/prilaku yang diambilnya.

---

<sup>11</sup> Heri B. Prayono, *Anthony Giddens Suatu Pengantar*, KPG dan Program Magister Ilmu Religi dan Budaya USI, Jakarta, 2002

Sistem nilai yang ada dapat berupa landasan pemikiran atau ideologi yang diadopsi oleh individu atau seorang kepala negara dalam mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi politik. Landasan pemikiran Neoliberalisme misalnya yang telah berkembang menjadi ideologi dapat mempengaruhi para pemegang otoritas pelaksana negara dalam memilih dan menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi politiknya.

## 1. Ideologi

Istilah ideologi seringkali hanya diartikan sebagai sebuah sistem ide, seperti misalnya ketika orang berbicara tentang ideologi liberal, konservatif atau sosialis. Menurut Gramsci, ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Ia membedakan antara sistem yang berubah-ubah (*arbitrary systems*) yang dikemukakan oleh intelektual dan filosof tertentu, dan ideologi organik yang bersifat historis (*historically organic ideologies*), yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu: "sejauh ideologi itu secara historis diperlukan, ia mempunyai keabsahan yang bersifat psikologis: ideologi 'mengatur' manusia, dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka, dan sebagainya". Ideologi bukanlah fantasi perseorangan, namun terjelma dalam cara hidup kolektif masyarakat. Rujukan Gramsci disini adalah pendapat Marx tentang 'soliditas keyakinan masyarakat'.<sup>12</sup>

Oleh karena itu ideologi bukanlah sesuatu yang berada di awang-awang dan berada di luar aktifitas politik atau aktifitas praktis manusia lainnya. Sebaliknya, ideologi mempunyai eksistensi materialnya dalam berbagai aktifitas praktis tersebut. Ia memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis serta perilaku

---

<sup>12</sup> Roger Simon, *Gramsci's Political Thought*, terjemahan diterbitkan oleh INSIST dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2000

moral manusia, dan ekuivalen dengan 'agama dalam makna sekulernya, yaitu satunya pemahaman antara konsepsi dunia dan norma tingkah laku'.<sup>13</sup>

Praktik ideologi mempunyai agen-agensya sendiri dalam bangunan kaum intelektual yang mana mereka itu menghususkan diri dalam menjabarkan ideologi-ideologi organik dan mengemban tugas melaksanakan reformasi moral dan intelektual. Gramsci menunjukkan bagaimana para pemimpin Partai Moderat berhasil melaksanakan tugas tersebut untuk kaum borjuis Italia dengan cara membangun blok ideologi yang mendapat perhatian luas di seluruh negara tersebut. Mereka bertindak sebagai 'intelektual organik' dari kaum borjuis Italia karena mereka memainkan peran pokok tersebut bagi negaranya. Gramsci berpendirian bahwa setiap kelas yang mempunyai kedudukan penting 'menciptakan satu atau lebih strata kaum intelektual yang sadar akan peranannya bukan hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam lapangan politik dan sosial'.<sup>14</sup> Dengan demikian, kelas pekerja juga harus menciptakan kaum intelektualnya sendiri jika mereka ingin berhasil menjadi hegemoni.

Dari pemikiran Gramsci tentang ideologi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ideologi mempunyai eksistensi materialnya dalam artian bahwa ia menjelma dalam praktik-praktik sosial setiap orang dan dalam lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi dimana praktik sosial tersebut berlangsung. Organisasi ini mencakup partai politik, serikat dagang dan organisasi lain yang menjadi bagian dari masyarakat sipil, aparat negara, dan organisasi-organisasi ekonomi seperti industri dan perusahaan komersial serta lembaga keuangan. Semua lembaga ini memainkan peran dalam menjabarkan, mempertahankan dan menyebarkan ideologi, atau dengan kata lain, lembaga-lembaga itu mempunyai efek-efek ideologis. Perlu diperhatikan juga bahwa ideologi ini berlaku bagi aparat negara dan organisasi masyarakat sipil misalnya; efek

---

<sup>13</sup>ibid  
<sup>14</sup>ibid

ideologis dari hukum dan sistem hukum yang berpengaruh; hukum tidak hanya mempunyai efek yang bersifat menekan (*coersive effect*).<sup>15</sup> Pada sisi lain dari semua penjelasan di atas ideologi tidak boleh direduksi semata-mata menjadi praktik-praktik sosial; karena ideologi tidak hanya mempunyai eksistensi material saja tetapi ideologi juga ada dalam ide-ide, serta melalui hubungan antara konsep dan pernyataan.

Ideologi disini dapat berperan sebagai pondas dalam menyatukan berbagai kekuatan sosial. Suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan kepentingan-kepentingan dari satu kelas, kelompok dan gerakan-gerakan lain ke dalam kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional. Kehendak umum hanya dapat dibangun melalui proses reformasi intelektual dan moral yang akan menciptakan konsepsi umum akan dunia. Harus ada 'kesatuan sosial-budaya di mana berbagai keinginan dengan tujuan yang berbeda-beda dapat dijalin menjadi tujuan tunggal, yang menjadi dasar bagi konsepsi umum mengenai dunia'. Dari sini dapat dilihat bahwa perjuangan ideologis adalah juga perjuangan politik, yaitu membangun kehendak kolektif nasional rakyat.

## 2. Hegemoni

Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut 'eugemonia', sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang di klaim oleh negara-negara kota (*polis* atau *citystates*) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lain yang sejajar.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Herry Hendarto, *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci: dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Pembangunan*, Tim Redaksi Duryarkara, Gramedia, Jakarta, 1993

Dalam pengertian di jaman ini, hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara "pemimpin". Dalam konteks politik internasional, misalnya, pada periode perang dingin, pertarungan pengaruh antara negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan mantan Uni Soviet, pada masa perang dingin, biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi kekuatan hegemonik di dunia.

Dalam kepustakaan Marxis menunjukkan bahwa konsep hegemoni secara historis pertama kali diproduksi di Rusia pada tahun 1880 oleh seorang Marxis Rusia, Plekanov.<sup>17</sup> Konsep ini dibangunnya sebagai bagian dari strategi guna menjatuhkan pemerintahan Tsar. Hegemoni dalam definisi ini mengacu pada pengertian kepemimpinan hegemonik proletariat serta perwakilan-perwakilan politik mereka serta aliansi-aliansi dengan kelompok lain seperti: kaum borjuis kritis, petani dan intelektual, yang berkeinginan sama untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar.

Konsep Hegemoni Gramsci dapat dielaborasi melalui penjelasannya tentang basis dari supremasi kelas:

"supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai "dominasi" dan sebagai 'kepemimpinan intelektual dan moral'. Dan di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk "menghancurkan" atau menundukkan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata; di lain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. Sebuah kelompok sosial dapat dan bahkan harus sudah menerapkan "kepemimpinan" sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan salah satu dari syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan

---

<sup>17</sup> Robert Blacklock, *Hegemony*, Tavistock Publication, London, 1986, dalam Nezar Patria dan Andi...

semacam itu). Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekkan kekuasaan, tapi bahkan bila dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, dia masih terus "memimpin" juga.<sup>18</sup>

Dalam kutipan diatas dengan jelas menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep: kepemimpinan (*direction*) dan dominasi (*dominance*). Hubungan kedua konsep ini menyiratkan tiga hal. Pertama, dominasi dijalankan atas seluruh musuh, dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-sekutu. Kedua, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menaekukkan aparatus Negara, atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan. Dan, ketiga, sekali kekuasaan Negara dapat dicapai, dua aspek supremasi klas ini, baik pengarahannya ataupun dominasi, terus berlanjut.<sup>19</sup> Kelas sosial akan memperoleh keunggulan (supremasi) melalui dua cara yaitu melalui cara dominasi atau paksaan (*coercion*) dan yang kedua adalah melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Cara yang terakhir inilah yang kemudian disebut oleh Gramsci sebagai Hegemoni.

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.<sup>20</sup>

Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, Quinlin Hoare dan Nowell Smith (ed.) International Publishers, New York, 1976

<sup>19</sup> Nozar Dalma & Andi Arief, *Antonio Gramsci, Negara & Hegemoni*, Pustaka Pelajar, 2003

<sup>20</sup> Soedarso Hadiz, *Tech Sosial Modern Perspektif Itali*, LP3ES, Jakarta, 1990

Kapitalisme masih bertahan karena buruh menerima keadaan umum ini, dominasi budaya borjuis membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan kekuasaan. Sehingga massa harus dibebaskan dari keterpesonaan pada hegemoni budaya kelas kapitalis sebelum perlawanan yang berhasil terhadap negara bisa terjadi.

Menurut Femia, Gramsci memandang hegemoni secara murni<sup>22</sup> yang memiliki arti sebagai sebuah kepemimpinan ideologi dan tidak dilakukan secara bersama seperti yang dikemukakan oleh Lenin.<sup>23</sup>

Teori Hegemoni oleh Gramsci ini dibangun dialas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Bagi Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukkan hegemoni, sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan "dominasi" yaitu kekuasaan yang dilopang oleh kekuatan fisik.<sup>24</sup>

Perdana Menteri Margaret Thatcher dari Inggris dan Presiden Ronald Reagan dari Amerika Serikat, dapat diangkat sebagai contoh bagaimana ideologi bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil. Pada dasawarsa 1980-an, dua pemimpin kuat ini memperjuangkan pasar bebas di dalam negeri maupun di arena internasional dan intervensi minimal oleh negara di semua bidang. Keduanya mengkritisi pelbagai kebijakan ekonomi Keynes yang mengedepankan

---

Murni yang dimaksudkan disini adalah bahwa konsep hegemoni Gramsci pada dasarnya tidak murni atau bersandar pada konsep hegemoni Lenin seperti yang banyak dipahami oleh para intelektual yang ada

Joseph Femia, *Gramsci's Political Thought. Hegemony, Consciousness and Revolutionary Praxis*. Clarendon Press, Oxford, 1981, dalam Nezar Patria dan Andi Ariel

Purnomo Sugiono, *Kritik Antonia Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Pustaka Pelajar, Mei 2004 hal 31

peran negara dalam ekonomi, termasuk dalam menentukan pelbagai macam tariff dan hambatan perdagangan internasional. Intervensi tersebut, termasuk kebijakan regulasi, dianggap oleh Teatcher sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi dalam suatu negara (krisis tahun 70-an) karena mengakibatkan pemborosan yang sangat tidak efektif dan efisien.

Di Amerika Serikat, kebijakan ini berujud pemotongan pajak dan deregulasi pasar. Tarif pajak pendapatan paling tinggi dipotong secara bertahap 70% tahun 1980 menjadi 33% tahun 1986. Industri telepon, penerbangan komersial, dan transportasi truk merupakan sasaran deregulasi besar-besaran, sehingga memungkinkan lebih banyak persaingan dan kebebasan menentukan harga.

Dari sini dapat dilihat bahwa kebijakan yang diambil oleh kepala pemerintahan satu negara sangat didasarkan oleh suatu landasan pemikiran (perspektif) yang diyakininya. Sejalan dengan itu maka pendekatan ini juga dapat digunakan dalam upaya untuk menjelaskan mengenai Hugo Chavez yang dengan sangat gigih mendorong ALBA untuk diterapkan oleh negara-negara Amerika Latin sebagai satu konsep kerjasama baru.

Untuk mengidentifikasi landasan pemikiran dibalik gagasan ALBA tesis ini memakai perspektif dalam ilmu ekonomi politik internasional yaitu perspektif liberal, perspektif Marxis dan perspektif Strukturalis.

#### 1.6. Asumsi

Hugo Chavez adalah seorang tokoh dari gerakan anti Neoliberal yang memberikan pengaruh pada gerakan-gerakan perlawanan terhadap hegemoni neoliberal di Amerika Latin. Terpilihnya Hugo Chavez sebagai Presiden

Venezuela berpengaruh pada terpilihnya tokoh-tokoh yang anti terhadap neoliberal sebagai Presiden di beberapa negara-negara Amerika Latin lainnya.

Asumsi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahwa kebijakan neoliberal telah lama mendominasi di Amerika Latin melalui FTAA dan lembaga internasional lainnya seperti IMF dan World Bank. Hugo Chavez sebagai Presiden Venezuela ingin mendorong satu kerjasama regional yaitu ALBA yang dilandasi oleh pemikiran Marxis-Strukturalis.

### **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Yaitu dengan mencoba untuk menjelaskan bagaimana peran Hugo Chavez dalam perlawanan terhadap hegemoni neoliberal di Amerika Latin dan apa landasan pemikiran dibalik gagasan ALBA sebagai satu konsep sistem kerjasama regional Amerika Latin yang coba didorong oleh Hugo Chavez.

Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa jurnal/buku yang secara khusus membahas tentang Hugo Chavez dan upayanya menerapkan ALBA di Amerika Latin. Data sekunder berasal dari buku serta tulisan artikel dari berbagai sumber dan dokumen-dokumen analisis tentang Venezuela dan Amerika Latin yang dapat diakses melalui internet.

### **1.8. Pembabakan**

Agar penulisan tesis ini dapat dilakukan secara sistematis dan mengalir sesuai dengan urutannya, maka penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab berikut sub-sub babnya.

## **Bab I**

- i. **Latar Belakang Masalah**
- ii. **Rumusan Masalah;**
- iii. **Tujuan Penelitian**
- iv. **Manfaat Penelitian**
- v. **Pendekatan Teori**
  - i. **Ideologi;** menjelaskan konsep tentang ideologi
  - ii. **Hegemoni;** menjelaskan teori tentang hegemoni
- vi. **Asumsi**
- vii. **Hipotesis**
- viii. **Metode Penelitian**

## **Bab II**

- i. **Perspektif dalam Ilmu Ekonomi Politik Internasional;** memberikan gambaran mengenai tiga perspektif dalam ilmu ekonomi-politik internasional.
- ii. **Regionalisme;** akan memberikan gambaran mengenai konsep regionalisme
- iii. **Neoliberal dan kritik terhadapnya;** akan digambarkan mengenai bagaimana dominasi neoliberal dan perlawanan terhadapnya.

## **Bab III**

- i. **Rumusan Kebijakan Ekonomi Politik Hugo Chavez;** memberikan gambaran mengenai kebijakan-kebijakan dalam masa Pemerintahan Hugo Chavez di Venezuela
- ii. **Peran Hugo Chavez Di Amerika Latin;** akan dijelaskan mengenai bagaimana peran Hugo Chavez di Amerika Latin terutama dalam konteks perlawanan terhadap dominasi neoliberal

#### **Bab IV**

**Analisis terhadap ALBA sebagai strategi integrasi regional Amerika Latin;** akan membahas dan menganalisis mengenai landasan pemikiran yang ada dibalik konsep regionalisme ALBA dan sejauh mana usaha konsep tersebut diterapkan.

#### **Bab V**

**Kesimpulan,** akan berisi kesimpulan dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan.

